



SEJARAH PENDIDIKAN PESANTREN BANJARSARI DALAM KERANGKA HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRISME

Akhlis Syamsal Qomar

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

akhliswahid9@gmail.com

Abstract: Banjarsari Islamic boarding school village is one of the fief villages at the same time became the most influential religious educational institution in Java in the 18-19 centuries. Year That year was the golden age of the well-known Banjarsari Islamic boarding school village as a village that is politically and economically independent from the practice of the economic exploitation system colonialism which was very impartial to the indigenous people of that time. As a fief village, Banjarsari is free from the influence and interference of any party, not except the government Dutch colonial. Although in the field of Dutch politics several times tried to interfere the internal affairs of the Banjarsari fief until it managed to split it into two, namely the village the fief of Banjarsari Kulon and the village of the fief of Banjarsari Wetan around 1815-16. as strong whatever the Dutch wish to interfere in Banjarsari's internal affairs, but he did not manage to enter in the field of economics until 1870. The internal dynamics of the Banjarsari fief economy walk independently. Based on the traditional rural economic system which focuses on the agricultural sector. In Banjarsari, in particular, the second sector is developing namely the trade of palm fiber brooms as a local product that helps boost the economy the community so that it makes Banjarsari a truly independent fief village.

Keyword: *Banjarsari Islamic Boarding School, agricultural sector, trade sector; independent village.*

Abstrak: Desa perdikan-pesantren Banjarsari merupakan salah satu desa perdikan sekaligus menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang paling berpengaruh di Jawa abad 18-19. Tahun-tahun tersebut merupakan masa keemasan dari desa perdikan-pesantren Banjarsari yang dikenal sebagai desa yang merdeka secara politik dan ekonomi dari praktik sistem eksploitasi ekonomi kolonial yang sangat tidak memihak masyarakat pribumi masa itu. Sebagai desa perdikan, Banjarsari lepas dari pengaruh dan campur tangan pihak manapun tidak kecuali pemerintah kolonial Belanda. Walaupun dalam bidang politik Belanda beberapa kali mencoba mencampuri urusan internal perdikan Banjarsari hingga berhasil memecahnya menjadi dua yaitu desa perdikan Banjarsari Kulon dan desa perdikan Banjarsari Wetan pada sekitar 1815-16. Sekuat apapun keinginan Belanda mencampuri urusan internal Banjarsari, tetapi ia tidak berhasil masuk dalam bidang ekonomi hingga tahun 1870. Dinamika internal ekonomi perdikan Banjarsari berjalan secara mandiri. Berbasis pada sistem ekonomi tradisional pedesaan yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Di Banjarsari secara khusus berkembang sektor kedua yakni perdagangan sapu ijuk sebagai produk lokal yang ikut mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga menjadikan Banjarsari sebagai desa perdikan yang benar-benar mandiri.

Kata Kunci: *Perdikan-pesantren Banjarsari, sektor pertanian, sektor perdagangan, desa mandiri.*

PENDAHULUAN

Banjarsari merupakan salah satu desa perdikan Kesultanan Yogyakarta di wilayah *mancanegara wetan*. Status desa perdikan Banjarsari diberikan oleh Sultan Hamengkubuwana I (bertakhta 1749-1792) Yogyakarta sebagai balas jasa kepada Kiai Ageng Muhammad bin Umar (Kiai Banjarsari I; 1768-1807) karena telah berhasil menangkap adik tiri sultan, Pangeran Singosari (1727-1768) yang memberontak di sekitar pegunungan selatan Malang pada 16 Juli 1768. Desa perdikan Banjarsari dalam perjalanannya dikenal sebagai salah satu desa perdikan dengan pesantren besar yang cukup ternama dan dikenal luas di seluruh Jawa sampai menarik santri dari seluruh Jawa termasuk Priangan bahkan luar Jawa¹.

Di Jawa, Perdikan Pesantren Banjarsari menjadi tujuan santri baik yang berasal dari pedalaman maupun dari pesisir untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Menarik kiranya mengetahui hasil survei yang dilakukan oleh Belanda mengenai pendidikan pribumi yang dilakukan pertama pada 1819. Survei tersebut berkesimpulan bahwa pesantren belum seluruhnya terdapat di Jawa. Lembaga-lembaga pendidikan yang

¹ Onghokham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*, (Jakarta: KPG, 2018), hlm. 179.

dianggap seperti pesantren dilaporkan hanya terdapat di pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun dan ponorogo. di wilayah lainnya, tidak ada pendidikan resmi, tetapi hanya pendidikan informal yang dilaksanakan di rumah-rumah pribadi dan masjid².

Para sejarawan pengkaji sejarah Jawa dan pesantren telah menempatkan Perdikan Pesantren Ageng Banjarsari sebagai perdikan sekaligus pesantren penting dalam dinamika Jawa pada abad ke 18. Tetapi, kajian historis tentang Perdikan Pesantren Banjarsari tersebut terbatas pada pendekatan politik. Beberapa kajian dari sejarawan misalnya, M. Noor Syamsoehari dalam buku Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari, Dagangan, Madiun & Ky. Ageng H. Abdurohman Tegalrejo, Takeran, Magetan, M. Barokah Hasan Besari dalam Buku Silsilah Kyai Ageng Kasan Besari Tegalsari, Jetis, Ponorogo, M.M. Kamil dalam Kyai Mangunharso Pembangun Desa Balerejo, dan Akhlis Syamsal Qomar dalam Perdikan Banjarsari: Sebuah Sejarah Singkat, keempatnya menggunakan pendekatan politik.

Dengan mempertimbangkan kajian terdahulu, penulis memandang aspek sosial dan ekonomi Perdikan Pesantren Banjarsari perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam. Secara teoritik, dari aspek sosial dan ekonomi tersebut diketahui Perdikan Pesantren Banjarsari merupakan sebuah entitas cukup menarik yang mempunyai kekhasan tersendiri. Banjarsari merupakan sebuah masyarakat desa dengan sistem ekonomi tradisional yang terpisah dari kerangka sistem eksploitasi ekonomi kolonial³.

Sistem ekonomi tradisional yang berlaku di Banjarasari tidak lepas dari relasi patron-klien, yang digambarkan orang Jawa sebagai *Kawula-Gusti*. Secara teoritis, relasi tersebut tidak lepas dari stratifikasi sosial pedesaan yang didasari oleh status kepemilikan barang berharga yaitu tanah⁴.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini fokus untuk mengkaji aspek sosial dan ekonomi Perdikan Pesantren Banjarsari antara tahun 1768-1870. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana aspek sosial dan ekonomi yang menjadikan Perdikan Pesantren Banjarsari mandiri dan terlepas dari sistem yang dibangun oleh

² Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), hlm. 93.

³ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2003), ix.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

pemerintah kolonial Belanda. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengkaji beberapa sumber kolonial dan lokal untuk mendapatkan gambaran secara lebih utuh Perdikan Pesantren Banjarsari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi tahap *heuristik* yaitu fase dimana penulis harus mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Tahap kedua yaitu *kritik sumber* baik internal maupun eksternal. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui otentitas sumber. Tahap berikutnya yaitu *interpretasi*, fase dimana penulis melakukan penafsiran atas berbagai data yang telah tersedia. Kumpulan penafsiran (interpretasi) inilah yang kemudian dirangkai dalam suatu tulisan sejarah atau sering disebut *historiografi*. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan gambaran lebih detail sejarah Desa Perdikan Banjarsari.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber tertulis yaitu karya L. Adam (Residen Madiun 1934-1938) yang berjudul “Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen. VI: Het Tijdvak van de ‘Palihan’ tot 1825”, Djawa, No. 20, September, hlm 329-46. Sumber tertulis lain yaitu karya F. Fokkens, yang berjudul “Vrije Desa’s of Java en Madoera” dan karya J. F. G. Brumund yang berjudul *Het Volksonderwijs onder de Javanen*. Ketiga tulisan tersebut khususnya digunakan untuk mengungkapkan aspek sosial dan ekonomi Perdikan Pesantren Banjarsari pada 1768-1870. Tulisan, Lucien Adam, F. Fokkens dan J. F. G. Brumund menjelaskan aspek sosial dan ekonomi Perdikan Pesantren Banjarsari secara singkat sehingga diperlukan sumber-sumber lain yang relevan khususnya sumber local berupa tradisi lisan yang berasal dari Perdikan Banjarsari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya Tanah Perdikan Banjarsari Madiun

Desa Banjarsari merupakan salah satu desa berstatus perdikan di wilayah *mancanegara wetan* tepatnya di Madiun. Status perdikan untuk Desa Banjarsari diberikan oleh Sultan Hamengkubuwana I kepada Kiai Ageng Muhammad bin

Umar sebagai balas jasa karena telah berhasil menangkap adik tiri sultan, Pangeran Singosari yang memberontak di sekitar pegunungan selatan Malang pada 16 Juli 1768. Hal tersebut bermula ketika Bupati Wedana Madiun Raden Ronggo Prawirodirjo I (1722-1784) datang ke Tegalsari sebagai utusan Sultan Hamengkubuwana I untuk meminta bantuan kepada Kiai Ageng Muhamamd Besari dalam misi penangkapan Pangeran Singosari, seorang adik tiri Sultan Hamengkubuwana I yang memberontak⁵.

Pada saat kedatangan Raden Ronggo Prawirodirjo I tersebut, Kiai Ageng Muhammad Besari telah memasuki usia tua (ia lahir sekitar tahun 1700)—yang tidak memungkinkan dirinya untuk turut serta dalam misi penangkapan Pangeran Singosari. Hal ini membuatnya memerintahkan kepada murid sekaligus menantunya yang belum lama melangsungkan pernikahan, Kiai Muhammad bin Umar, agar turut serta dalam misi tersebut⁶.

Kiai Muhammad bin Umar ikut dalam pasukan gabungan Jawa dan VOC menuju Malang. Kiai Muhammad bin Umar berangkat dari desa tempat tinggalnya yaitu Perdikan Tegalsari di Ponorogo untuk bergabung dengan pasukan gabungan Jawa dan VOC. Pasukan gabungan melanjutkan perjalanan menuju daerah pegunungan selatan Malang setelah mendirikan perkemahan di Srengat [kini masuk wilayah Blitar] untuk sementara waktu. Pemimpin pasukan memerintahkan kepada sebagian prajurit untuk mendirikan perkemahan setelah sampai di tepi Sungai Brantas dekat perbatasan wilayah Pangeran Singosari di Blitar. Kiai Muhammad bin Umar sendiri memerintahkan kepada beberapa prajurit untuk menanak nasi (*ngliwet*), sedangkan kiai sendiri undur diri untuk mengerjakan sholat. Beberapa prajurit yang mendapat tugas menanak nasi bercelet, “[...] perang dengan kiai adanya ya hanya memasak nasi, hanya memikirkan perut, padahal sudah dekat dengan tujuan”. Rupanya, Kiai Muhammad bin Umar mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh beberapa prajurit tersebut dan langsung meminta Raden Ronggo I untuk memerintahkan empat puluh orang yang terdiri dari prajurit dan santri untuk

⁵ Merle C. Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792: A History of the Division of Java*, (London: Oxford University Press, 1974), 135.

⁶ M. Barokah Hasan Besari, *Silsilah Kiai Ageng Kasan Besari Tegalsari Jetis Ponorogo*. (Ponorogo, 1974), hlm. 20

turun di medan perang, sedangkan sisanya diperintahkan untuk tetap siaga di perkemahan⁷.

Cerita tutur dari Banjarsari menyebutkan bahwa akhirnya Kiai Muhammad bin Umar dan Raden Ronggo Prawirodirjo I disertai empat puluh orang prajurit berhasil menembus tiga lapis pertahanan Pangeran Singosari hingga dapat bertemu langsung dengan Sang Pangeran. Cerita menyebutkan bahwa pertahanan tersebut dapat ditembus bukan melalui peperangan melainkan dengan memakai kekuatan dalam, yaitu kewibawaan Kiai Muhammad bin Umar. Pangeran Singosari telah merasa kalah saat mengetahui pasukan gabungan VOC, Kasunanan, dan Kesultanan bisa menembus tiga lapis barisan pertahanan, sehingga tiada jalan lain selain menyerahkan diri. Dalam pandangan Pangeran Singosari, prajurit yang sebelumnya ditugaskan pada tiga lapis pertahanan telah digantikan oleh anak-anak kecil membawa *cuthik* (belahan bambu) dan panah kecil, serta berpakaian mirip pasukan gabungan di bawah pimpinan Raden Ronggo Prawirodirjo I dan Kiai Muhammad bin Umar. Namun, setelah Pangeran Singosari keluar dari markas pertahanannya, ia sadar bahwa anak-anak kecil dalam penglihatannya tadi tidak lain adalah prajuritnya sendiri. Pada titik ini, Pangeran Singosari sadar telah kalah wibawa dari Kiai Muhammad bin Umar⁸. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari filosofi nasi liwet—*ngliwet* bermakna ‘lewat selamat’—yang sebelumnya sempat diperintahkan agar dimasak para prajurit oleh Kiai Muhammad bin Umar.

Pangeran kemudian bersedia menyerah pada 16 Juli 1768 dengan mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, ia bersedia untuk menyerahkan diri dan dibawa menghadap Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta tanpa *dirangket* atau diborgol. Kiai Muhammad bin Umar juga bersedia menjamin keselamatan Pangeran Singosari bahwa sultan tidak akan menjatuhkan

⁷ M. Noor Syamsoehari, *Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari, Dagangan Madiun dan Ky. Ageng H. Abdurohman Tegalrejo, Takeran Magetan*. (Magetan. Tidak diterbitkan, 1984), hlm. 6.

⁸ Informasi ini didapat dari ketua takmir Masjid Al-Muttaqin/ Masjid Kiai Ageng Muhammad bin Umar, Mas Wijayanto, wawancara di rumahnya, Desa Banjarsari Kulon, 13 Mei 2020.

hukuman mati kepadanya⁹. Syarat yang diajukan akhirnya dapat terpenuhi. Catatan kolonial menuliskan bahwa ketika Pangeran Singosari berniat menyerahkan diri, baik Pakubuwono III (bertakhta, 1749–88) maupun Mangkubumi (Hamengkubuwono I) sama-sama tidak ingin melakukan hal apa pun dengannya. Ia dibawa ke Surabaya untuk nantinya diasingkan ke luar Jawa. Dicatat bahwa Pangeran Singosari sempat dikirim ke Batavia tetapi diketahui ia meninggal sebagai seorang tawanan yang dirantai sebelum dapat dikirim ke luar negeri¹⁰. Selain itu, cerita tutur Banjarsari menyebutkan bahwa Pangeran Singosari dan anggota keluarganya bersama Kiai Muhammad bin Umar, Raden Ronggo I, serta pasukan gabungan kemudian berangkat menuju Yogyakarta seusai misi berhasil¹¹.

Perjalanan yang ditempuh antara pegunungan selatan Malang dan Yogya dengan melewati Madiun cukup sulit. Jarak antara Madiun dan Yogyakarta sendiri hampir dua ratus kilometer—sangat jauh pada masa itu. Lebih-lebih, jalanan teramat kotor dan berubah menjadi lautan lumpur kala musim hujan. Sehingga, mafhum bahwa *kukuban sakwetaning* [kawasan sebelah timur] Gunung Lawut ersebut dari masa ke masa menjadi kantong pemberontak. Medan yang ditempuh dalam perjalanan antara Yogyakarta dan *monconegoro wetan* [wilayah luar sebelah timur keraton-keraton] itu cukup sulit sehingga memberi semacam perasaan bebas merdeka kepada para penguasa timur, khususnya pejabat tinggi yang mempunyai wilayah bawahan di daerah-daerah paling timur—misalnya yang berkedudukan di Madiun¹².

Setelah sampai di Yogyakarta dan bertemu dengan raja, Sultan Hamengkubuwono I menyampaikan terima kasih kepada Kiai Muhammad bin Umar karena telah berhasil membawa Pangeran Singosari ke Yogyakarta tanpa pertumpahan darah. Sultan juga memberikan hadiah tanah perdikan kepada Kiai Muhammad bin Umar. Tanah perdikan tersebut diberikan untuk dibabat dan

⁹ M. Noor Syamsoehari, *Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari, Dagangan Madiun dan Ky. Ageng H. Abdurohman Tegalrejo, Takeran Magetan*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Merle C. Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi*, hlm. 135.

¹² Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama Jawa, 1785-1855*, (Jakarta: KPG, 2012), hlm. 14.

ditinggali olehnya dan keturunannya. Sang kiai dan keturunannya tidak diwajibkan untuk menyerahkan pajak kepada raja dan dibebaskan dari kerja wajib. Namun, sebagian penghasilan dari pengelolaan desa perdikan secara eksplisit harus digunakan untuk pemeliharaan pesantren. Kiai juga diberikan wewenang mengadili sendiri apabila ada masalah di tanah perdikan itu. Saat Desa Perdikan Banjarsari pecah menjadi dua pada sekitar 1815 atau 1816—menjadi Banjarsari Kulon dan Banjarsari Wetan—kedua desa sebenarnya masih dikenai kewajiban membayar pajak, tetapi dibebaskan dari sebagian kewajiban kerajaan. Pajak yang dimaksud tidak selalu berupa uang, melainkan berupa natura yang lazim disebut sebagai *bulubekti*. Kedua pecahan Banjarsari tersebut diwajibkan menyerahkan *bulubekti* kepada bupati, antara lain berupa satu kapun, tujuh kati beras, dan dua puluh lima buah kelapa¹³.

Setibanya di Tegalsari kembali, Kiai Muhammad bin Umar meminta izin dan restu kepada guru sekaligus mertuanya untuk memabat hutan guna dijadikan permukiman. Kiai Muhammad bin Umar beserta beberapa santri pengikutnya berjalan dari Tegalsari menuju arah utara. Setelah berjalan beberapa lama, Kiai Muhammad bin Umar dan beberapa santri pengikutnya tiba di hutan yang terletak di sebelah utara Sungai Catur yang berbatasan langsung dengan Desa Sewulan di sebelah selatan. Kiai Muhammad bin Umar memabat hutan hingga kurang lebih sembilan ratus hektar untuk dijadikan Desa Banjarsari¹⁴.

Asal nama Banjarsari sendiri terdiri dari dua kata, '*banjar*' dan '*sari*'. '*Banjar*' bermakna 'tebarkan' dan '*sari*' bermakna 'kebaikan'. Dengan demikian, Banjarsari berarti 'selalu menebarkan kebaikan kapan pun dan dimana pun'. Hal tersebut dikuatkan dengan lambang yang berbentuk cakra (bintang segi delapan) atau *Rub al-Hizb* yang terdapat tepat di atas mihrab (pengimaman) Masjid Kiai Ageng Muhamamd bin Umar. *Rub al-Hizb* merupakan perpaduan antara lafaz Allah

¹³ F. Fokkens. *Vrije desa's op Java en Madura*", *TBG* 31:477–517. 1886:503–5. Lihat juga Peter Carey dan M. C. Hoadley, *The Archive of Yogyakarta. Vol. II: Documents relating to Economic and Agrarian Affairs*, (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 272.

¹⁴ M. Noor Syamsoehari, *Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari, Dagangan Madiun dan Ky. Ageng H. Abdurohman Tegalrejo*, hlm. 6.

dan lafaz Muhammad yang bermakna anjuran untuk menebarkan kebaikan ke segala penjuru¹⁵.

Kiai Muhammad bin Umar mulai membabat hutan bersama para santri sejak sekitar akhir Juli 1768. Sedangkan, sang kiai, istrinya, dan beberapa santri baru melakukan boyongan ke Banjarsari pada Kamis Pon, 29 Desember 1768 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1182 Hijriah¹⁶. Dapat disimpulkan bahwa sang kiai bersama beberapa santri yang ia bawa dari Tegalsari sejak mulai membabat hutan pertama; mendirikan masjid, *ndalem* [rumah tinggal kiai], dan pondok berupa beberapa kamar angkring untuk santrinya; hingga siapnya bangunan untuk ditempati memakan waktu sekitar lima bulan, dari bulan Juli hingga Desember 1768. Setelahnya, Kiai Muhammad bin Umar resmi menjadi pemimpin perdikan sekaligus pengasuh Pesantren Banjarsari dengan gelar Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Ia juga dikenal dengan Kiai Ageng Mirah VI, gelar yang sama telah dipakai oleh lima generasi leluhurnya¹⁷.

A. Perdikan Banjarsari, Sebuah Desa yang Merdeka (Politik dan Ekonomi)

Banjarsari merupakan sebuah desa dengan status perdikan atau merdeka yang berasal dari kata “maharddika.” Menurut ahli bahasa Sanskerta Prof. Kern, istilah “maharddhika” yang mempunyai arti “keramat” atau “sangat bijaksana/alim.” Dalam bahasa Jawa kuno ‘maharddhika’ sering dipakai untuk menunjuk pandita atau bikkhu Budha. Pengertian tersebut mengandung makna ‘orang atau sesuatu yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi¹⁸. Raja membebaskan desa perdikan dari kewajiban pajak dan kewajiban lainnya, untuk dialihkan kepada lembaga di atasnya dengan syarat mereka harus merawat atau

¹⁵ Informasi ini didapat dari ketua takmir Masjid Al-Muttaqin/Masjid Kiai Ageng Muhammad bin Umar, Mas Wijayanto, wawancara di rumahnya, Desa Banjarsari, 13 Mei 2020; dan korespondensi pribadi, 6 Juli 2020.

¹⁶ Papan silsilah di dalam cungkup utama makam Kiai Ageng Muhammad bin Umar tertulis boyong ke Banjarsari pada Kamis, 29 Desember 1768 Masehi yang bertepatan dengan 22 Syakban 1182 Hijriah. Hal tersebut tidak tepat sebab tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1182 Hijriah.

¹⁷ R. Hadi Purnomo, *Silsilah Kiai Mohamad bin Umar*, (Madiun: t.p., 1989), hlm. v.

¹⁸ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hlm. 169.

mengelola pondok pesantren¹⁹. Hak istimewa tersebut diberikan kepada kepala desa (yang memegang jabatan ini secara turun-temurun), bukan kepada penduduk desa.

Konteks Banjarsari, hak istimewa desa perdikan diberikan kepada Kiai Ageng Muhammad bin Umar sebagai kiai pertama sekaligus menjadi kepala desa perdikan yang dipandang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Status perdikan tersebut menjadikan Desa Banjarsari lepas dari campur tangan kekuasaan manapun, walaupun masih tetap menjalin hubungan baik dengan keraton Yogyakarta yang dibuktikan dengan adanya kewajiban kiai perdikan Banjarsari menghadap Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Kewajiban menghadap Sultan hanya dalam momen-momen tertentu, misalnya sewaktu *Grebeg Mulud*, sebuah peringatan yang diadakan untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Hubungan baik yang terjalin dengan Keraton Yogyakarta dengan perdikan Banjarsari juga dikuatkan dengan adanya perkawinan antara keturunan kiai pertama perdikan Banjarsari dengan keluarga Keraton Yogyakarta maupun keluarga Bupati Madiun yang notabene trah dari Sultan Hamengkubuwana Yogyakarta. Perkawinan tersebut antara lain: (1) Kiai Tafsir Anom I (Kiai Banjarsari Wetan I; 1815-1860), putra Kiai Ali Imron (Kiai Banjarsari-sebelum pecah pada 1815-1816-yang memimpin Banjarsari antara 1807-1809) dengan Raden Ayu Tafsir Anom I (cucu R. Ronggo Mangundirjo/Prawirodirjo II, Bupati Madiun 1784-1796, sekaligus buyut Sultan Hamengkubuwono I (bertakhta 1749-1792). Pernikahan antara Kiai Tafsir Anom I dengan Raden Ayu Tafsir Anom I dilakukan pada 1826²⁰. (2) Kiai Tafsir Anom II (Kiai Banjarsari Wetan II; 1860-1893, putra Kiai Tafsir Anom I) dengan Raden Ayu Tafsir Anom II yang masih terhitung sebagai cicit dari Sultan Hamengkubuwana II; dan (3) Kiai Umar Sosroulomo (Kiai Banjarsari Wetan III; 1893-1923, putra Kiai Tafsir Anom II) dengan Raden Ayu Umar Sosroulomo, putri dari R.M.A. Sosronegoro, Bupati Madiun yang menjadi menantu panglima Perang

¹⁹ Onghokham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*, (Jakarta: KPG, 2018), hlm. 33.

²⁰ Adam Lucien, 1940. "Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen. VI: Het Tijdvak van de 'Palihan' tot 1825", Djawa, No. 20, September, hlm 329-46.

Jawa, Sentot Prawirodirjo²¹. Beberapa perkawinan antara keluarga perdikan Banjarsari dengan keluarga Keraton Yogyakarta sekaligus keluarga Bupati Madiun tersebut tidak lepas dari hak istimewa desa perdikan Banjarsari.

Hak istimewa desa perdikan di Madiun Raya khususnya Desa perdikan Banjarsari tetap dipertahankan saat pihak kolonial Belanda menguasai wilayah *mancanegara wetan* milik Kesultanan Yogyakarta pasca Perang Jawa pada 1830. Hal tersebut dikuatkan dengan dipanggilnya para kepala desa perdikan di wilayah Madiun tidak terkecuali Kepala Desa Perdikan Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon (pecah sekitar 1815-16) untuk hadir di Magetan pada 6 Agustus 1830. Di Magetan, para kepala desa perdikan bertemu dengan Komisaris Pieter [Herbert Baron] van Lawick van Pabst [1780–1846], Anggota Dewan Hindia (*Raad van Indië*), Pieter Merkus [1787–1844; Gubernur Jenderal, 1841–44], Pangeran Adipati Pakualam II [1786–1858; bertakhta, 1830–1858], Bupati Wedana Madiun Pangeran Ronggo Prawirodiningrat [menjabat, 1822–59], dan bupati-bupati Madiun Raya. Pokok-pokok bahasan dalam pertemuan itu yaitu: (a) pemerintah mengonfirmasi keberadaan desa pakuncen dan perdikan; (b) desa-desa perdikan dibebaskan dari bea cukai dan pajak; (c) desa pakuncen harus mengurus perawatan makam; (d) ketentuan pemerintah dan kebiasaan yang berlaku di Kerajaan Yogyakarta harus dipatuhi.

Pada tanggal 29 Desember 1833, ketentuan tersebut sekali lagi dikomunikasikan oleh Residen Madiun, Lodewijk de Launy [menjabat, 1830–1838], kepada para kepala desa pakuncen dan perdikan di hadapan Bupati Wedana Madiun, Pangeran Ronggo Aryo Prawirodiningrat. Dengan demikian, pemerintah kolonial mempertahankan segala otorisasi lisan dari peristiwa-peristiwa yang menyebabkan desa-desa menjadi perdikan atau pakuncen. Keputusan tersebut lebih lanjut dijelaskan pada *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* [Lembaran Negara Hindia Belanda] tanggal 22 September 1853, No. 2.

Kenyataannya, pemerintah kolonial Belanda tidak konsisten untuk tidak mencampuri urusan internal Desa Perdikan Banjarsari. Sebab tidak lama pasca

²¹ R. Hadi Purnomo, *Silsilah Kiai Mohamad bin Umar*, hlm. xiv.

pengakuan hak-hak desa perdikan dan pekuncen di Magetan pada 6 Agustus 1830, pemerintah kolonial berusaha mencampuri urusan internal Desa Perdikan Banjarsari. Campur tangan Belanda tidak lain bertujuan untuk mengurangi kekuatan Banjarsari melalui suatu bentuk *palihan* [pembagian]. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah kolonial untuk turut campur adalah pengaruh besar Kanjeng Kiai Maulani, yang saat memangku jabatan wali Kiai Perdikan Banjarsari, diketahui berhubungan secara tidak langsung dengan Pangeran Diponegoro (1785–1855) dalam perjuangan mengobarkan Perang Jawa 1825–1830²².

Desa perdikan Banjarsari sesungguhnya menjadi tempat tinggal beberapa haji selain Kiai Ali Imron [Kiai Ageng Banjarsari II] yang telah melakukan perjalanan ibadah haji sebelum wafatnya pada 1809.²³ Sedikitnya, ada empat orang haji di Banjarsari yang terhitung sebagai generasi ketiga dari Kiai Banjarsari I [Muhammad bin Umar], yaitu (i) Haji Idris (juga dilafalkan “Edris”)—menantu Nyai Ahmad Purwonganti (sekitar 1769–1830), putri pertama Kiai Ageng Banjarsari I sekaligus kakak Kanjeng Kiai Maulani; (ii) Haji Usman (juga dilafalkan “Ngusman”)—menantu Kanjeng Kiai Maulani; (iii) Kiai Haji Muhammad Sangit—putra Kanjeng Kiai Maulani; dan (iv) Haji Harun—menantu Ki Mohamad Pekih (sekitar 1777–1840), adik Kanjeng Kiai Maulani²⁴. Beberapa haji yang tinggal di Desa Banjarsari tersebut tidak lepas dari pengawasan ketat pemerintah kolonial. Pemerintah khawatir bahwa penduduk bumiputra yang melakukan perjalanan haji akan pulang dengan membawa pikiran-pikiran baru yang dapat memicu perlawanan. Kehati-hatian tersebut bercermin dari Perang Jawa dan pemberontakan-pemberontakan petani sepanjang paruh kedua abad ke-19 yang dipelopori oleh para pemuka agama dan haji²⁵.

Selain itu, Belanda mengetahui bahwa Banjarsari menjadi tempat yang aman bagi pelarian mantan prajurit Diponegoro dan kerabat keraton Yogyakarta

²² Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama Jawa*, hlm. 940, dan hlm. 944-945.

²³ Informasi ini didapat dari eyang putri Sri Aningsih, seorang keturunan Kiai Ali Imron (Kiai Banjarsari II, 1807–09), wawancara di rumahnya, Desa Banjarsari Wetan, 7 Maret 2020.

²⁴ R. Hadi Purnomo, *Silsilah Kiai Mohamad bin Umar*, hlm. vii.

²⁵ Lihat di dalam <http://www.tirto.id/taktik-belanda-mengendalikan-islam-melalui-gelar-haji-cvHx>, diakses pada 8 Maret 2020

atau orang-orang yang bersimpati terhadap perjuangan Diponegoro. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya makam tanpa penanda di pekarangan belakang salah satu rumah warga di Desa Banjarsari Kulon yang dikenal masyarakat sebagai makam Kusumoyudan²⁶. ‘Kusumoyudan’ berasal dari dua kata, ‘*kusumo*’ berarti ‘bunga’ dan ‘*yuda*’ bermakna ‘perang’. Kedua kata tersebut jika digabungkan berarti ‘bunganya perang’, lebih jauh bermakna ‘pahlawan dari medan perang’ atau ‘yang gugur di medan perang yang harum namanya’. Menurut tuturan yang didapat penulis, sang Kusumoyudan berpesan sebelum wafat agar makamnya tidak diberi tanda apa pun. Kami menduga bahwa pemilik makam enggan dikenali nama dan makamnya untuk menghindari spionase Belanda. Hal ini dapat dimengerti karena sesudah penangkapan Pangeran Diponegoro secara licik oleh Belanda pada 28 Maret 1830, sebagian besar mantan prajurit Diponegoro memilih melakukan bedol desa dan menggungsi ke Jawa bagian timur melalui pantai selatan dan menjadi cikal bakal komunitas baru di Trenggalek, Kediri, Blitar, Malang Selatan, dan lainnya (hal ini dapat dilacak dari logat penduduk daerah Malang Selatan yang khas Yogya—dibandingkan dengan Malang Utara yang dekat dengan logat Madura). Banjarsari menjadi salah satu tempat yang aman di Madiun bagi pelarian mantan prajurit Diponegoro karena status perdikannya menjadikan wilayah tersebut wilayah otonom sehingga tidak ada dalih pemerintah kolonial untuk dapat masuk ke wilayah Banjarsari.

Kenyataan ini dimengerti oleh Belanda sehingga muncul kekhawatiran akan datangnya perlawanan terhadap pemerintah kolonial dari daerah ini. Oleh sebab itu, Belanda berusaha mencampuri urusan dalam pemerintahan desa perdikan Banjarsari dengan cara membujuk Kanjeng Kiai Maulani agar mau diangkat menjadi bupati di Kertosono²⁷. Figur Kanjeng Kiai Maulani dipandang sebagai kiai perdikan yang cakap dan kharismatik, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sakti—sehingga berbahaya bagi Belanda. Selain itu, beberapa pelarian mantan prajurit

²⁶ Informasi ini didapat dari eyang putri Sri Aningsih, seorang keturunan Kiai Ali Imron (Kiai Banjarsari II, 1807-9), wawancara di rumahnya, Desa Banjarsari Wetan pada 7 Maret 2020.

²⁷ Versi lain bupati di Mojokerto. Informasi ini didapat dari Bapak Sugeng, seorang keturunan Kiai Ali Imron (Kiai Banjarsari II, 1807-9), wawancara di rumahnya, Desa Banjarsari Kulon, 4 Juli 2020.

Diponegoro yang dikenal militan memilih tinggal di Desa Banjarsari sehingga kemungkinan bangkitnya gerakan perlawanan menjadi lebih nyata. Tawaran kedudukan di Kertosono ditolak Kiai Maulani secara halus. Kanjeng Kiai Maulani lebih memilih menjadi kiai perdikan dan memimpin Pesantren Banjarsari daripada menjadi bupati di Kertosono. Pilihan tersebut merupakan upaya pencegahan agar Belanda tidak dapat campur tangan lebih jauh terhadap urusan internal Banjarsari²⁸.

Belanda tidak putus asa setelah bujukannya ditolak secara halus. Belanda kembali menawarkan agar Kanjeng Kiai Maulani bersedia untuk diangkat menjadi bupati di Maospati. Lagi-lagi, tawaran tersebut ditolak secara halus dengan alasan jika ia menjadi bupati, putra-putrinya kelak akan melupakan tongkat estafet kiai perdikan dan pesantren Banjarsari. Kiai Maulani kemudian hanya mengambil gelar ‘kanjeng’, gelar yang biasa dipakai oleh bupati di Jawa masa itu. Selain itu, Kanjeng Kiai Maulani meminta izin kepada pemerintah kolonial untuk meluaskan wilayah desa perdikan Banjarsari ke sebelah timur yang sekarang dikenal dengan Dusun Mawatsari dan Dusun Beketok sehingga luas wilayah perdikan Banjarsari menjadi sekitar dua ribu hektar²⁹.

Bersamaan dengan bertambah luasnya wilayah Banjarsari, putra almarhum Kiai Ali Imron, Tafsir Anom I telah memasuki usia tiga puluh satu tahun pada 1830. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Belanda setelah dua kali upaya memperlemah desa perdikan Banjarsari tidak berhasil. Belanda memandang kesempatan tersebut sebagai saat yang tepat untuk mengurangi kekuatan desa perdikan Banjarsari dengan cara memecahnya menjadi dua—Banjarsari Kulon dan Wetan. Desa Banjarsari Kulon tetap dipimpin oleh Kanjeng Kiai Maulani dan Desa Banjarsari Wetan dipimpin oleh putra almarhum Kiai Ali Imron, Kiai Tafsir Anom I (1799—sekitar 1860)³⁰. Lebih dari itu, Belanda juga turut campur dalam rincian pembagian wilayah kedua desa yang hasilnya tidak teratur dan kacau letaknya.

²⁸ M. Noor Syamsoehari, *Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari, Dagangan Madiun dan Ky. Ageng H. Abdurohman Tegalrejo*, hlm, 8.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

³⁰ *Ibid.*

Sebagian wilayah Desa Banjarsari Wetan terletak di tengah wilayah Desa Banjarsari Kulon dan sebaliknya.

Pasca keberhasilan pemerintah kolonial Belanda mencampuri pemerintahan internal Desa Perdikan Banjarsari, tidak ada dalih bagi mereka untuk mencampuri aspek ekonomi di Banjarsari. Secara ekonomi Banjarsari tetap mandiri sebagai desa perdikan tanpa terseret ke dalam sistem eksploitasi ekonomi kolonial hingga 1870. Perdikan Banjarsari tidak dikenai kewajiban Tanam Paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada 1830. Desa perdikan Banjarsari (Kulon dan Wetan) merupakan dua dari tiga puluh dua desa perdikan yang tetap dikenai kewajiban untuk membayar pajak, tetapi bebas dari sebagian kewajiban kerajaan. Pajak yang dimaksud tidak selalu berupa uang, melainkan berupa barang hasil desa itu yang lazim disebut sebagai *bulubekti*. Desa perdikan Banjarsari Kulon dan Banjarsari Wetan diwajibkan menyerahkan *bulubekti* kepada bupati yaitu berupa 1 kapun, 7 kati beras, dan 25 buah kelapa³¹.

Status perdikan yang dimiliki oleh Banjarsari menjadikan pola kepemilikan tanah di Banjarsari berbeda dengan desa-desa lainnya. Kepemilikan tanah pribadi dapat ditemukan di sini dan penduduk bahkan memiliki catatan kepemilikan tanah pribadi dan deskripsi tanah tersebut, yang dibuat bersama kiai perdikan sekaligus kepala desa perdikan Banjarsari. Perubahan yang terjadi dari kepemilikan tanah pribadi menjadi tanah komunal di desa-desa sekitar mungkin mendorong penduduk desa perdikan membuat catatan untuk memperkuat hak milik mereka³².

Selain itu jenis tanaman dan kesuburan tanah juga mempengaruhi pola kepemilikan tanah. Tanah di desa perdikan Banjarsari cukup subur sebab secara geografis wilayah Banjarsari terletak di Madiun yang notabene daerah dataran rendah yang terletak di cekungan (sebelah timur dibatasi oleh Gunung Wilis, sebelah barat dibatasi oleh Gunung Lawu, sebelah selatan dibatasi pegunungan kapur pantai selatan dan sebelah utara berbatasan dengan pegunungan Kendeng). Tepat sebelah selatan Banjarsari juga terdapat Sungai Catur yang menjadi batas

³¹ F. Fokkens, 1886. "Vrije desa's op Java en Madura", *TBG* 31:477–517., hlm. 505.

³² Onghokham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*. (Jakarta: KPG, 2018), hlm. 180.

alam antara desa perdikan Banjarsari dan desa perdikan Sewulan. Sehingga sektor pertanian menjadi denyut nadi masyarakat desa perdikan Banjarsari.

Selain sektor pertanian yang mendominasi, Banjarsari juga mengembangkan sektor perdagangan tradisional berupa sapu ijuk. Sapu ijuk merupakan sapu yang berbahan dasar dari serat pohon aren. Pohon aren banyak tumbuh di desa perdikan Banjarsari sebelah timur yang secara geografis merupakan lereng Gunung Wilis. Pembuatan sapu ijuk juga tidak begitu sulit. Ijuk yang telah diperoleh disortir kemudian dipotong sesuai kebutuhan lalu masuk ke teknis penyisiran untuk merapihkan ijuk dengan menggunakan besi runcing. Sapu ijuk yang dihasilkan masyarakat Banjarsari tidak sedikit dijual ke desa-desa sekitar yang secara langsung ikut mendongkrak perekonomian masyarakat desa perdikan Banjarsari.

B. Sosial Masyarakat Perdikan Banjarsari

Masyarakat di Jawa sangat heterogen, terbagi dalam stratifikasi sosial yang sangat kompleks. Masyarakat di pedesaan di Jawa pada abad ke-19 terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kaku. Perbedaan kelas dalam masyarakat pedesaan di Jawa didasarkan atas penguasaannya terhadap tanah. Meskipun setiap daerah memiliki istilah yang berbeda-beda dalam menyebutkan stratifikasi sosialnya, tetapi intinya masyarakat di pedesaan Jawa terbagi dalam dua kelas yang sangat kontras dalam oposisi biner, yaitu pemilik tanah dan kelas yang tidak memiliki tanah, yang oleh beberapa sarjana Barat disebut dalam istilah *the have* dan *the have not*. Stratifikasi sosial pada masyarakat di pedesaan Jawa ditentukan oleh pola penguasaan terhadap tanah. Pemilik tanah dikenal sebagai kaum ningrat, priyayi, atau *gusti*. Sedangkan kelas yang tidak memiliki tanah yaitu rakyat jelata yang disebut sebagai *wong cilik* atau *kawulo*.

Konteks desa perdikan Banjarsari, Kiai Ageng Muhammad bin Umar merupakan pembabat desa perdikan Banjarsari sehingga ia dan keturunannya yang kelak menggantikannya sebagai kiai sekaligus kepala desa perdikan Banjarsari otomatis menjadi kelompok priyayi atau *gusti* di pedesaan, juga disebut sebagai *ndoro* yang berasal dari kata *bendoro* atau tuan. Beberapa kiai perdikan Banjarsari

diketahui memiliki ikatan perkawinan dengan anggota Kasultanan Yogyakarta dan cukup berkuasa. Status perkawinan tersebut mengukuhkan beberapa kiai perdikan Banjarsari sebagai kelompok priyayi desa di Jawa. Disisi lain, beberapa santri-yang mengikuti Kiai Ageng Muhammad bin Umar dari perdikan pesantren Tegalsari Ponorogo untuk babat tanah di Banjarsari-dan keturunannya serta pendatang yang berasal dari luar dari kelompok rakyat jelata menjadi kelompok lapisan bawah yakni sebagai rakyat jelata yang disebut sebagai *wong cilik* atau *kawulo*.

Pembagian stratifikasi di desa perdikan Banjarsari berkaitan erat dengan pertanian, sektor dimana mayoritas masyarakat Jawa di pedesaan bergantung hidup. Pengelolaan pertanian di desa perdikan Banjarsari didasarkan pada kepemilikan komunal atas semua tanah, termasuk milik desa. Menurut tradisi kepemilikan ini hanya jatuh pada kiai perdikan Banjarsari dan keturunannya. Disaat yang sama, kelompok lain yaitu rakyat atau *wong cilik* tidak memilikinya. Dalam hal tertentu pemilik tanah sangat tergantung kepada bagaimana mereka menguasai pekerja-pekerja individual yang mampu dibayarnya. Pemilik tanah dapat melepaskan lahan seluas tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik tanah akan membayarkan separuh panen kepada cacah atau kepala adatnya, atau juga menyisihkan sebagian untuk mengganti kerja yang perlu mereka lakukan³³.

Kiai perdikan Banjarsari dan keturunannya sebagai pemilik tanah tidak mungkin dapat mengerjakan sendiri tanahnya sehingga memerlukan orang-orang yang tidak memiliki tanah yang disebut rakyat atau *kawulo*. Biaya hidup *kawulo* ditanggung oleh kiai perdikan Banjarsari. Sebagai imbalannya, *kawulo* memiliki kewajiban untuk bekerja di tanah-tanah kiai perdikan Banjarsari. Hubungan antara pemilik tanah dan pekerja pertanian di Banjarsari mafhum disebut hubungan antara *gusti* dan *kawulo*. Hubungan antara *gusti* dan *kawulo* tersebut merupakan manifestasi dari relasi personal patron-klien. Praktik hubungan tersebut senyatanya bisa disebut langgeng sebab pertanian tetap menjadi penopang perekonomian masyarakat di desa perdikan Banjarsari. Dari segi ekonomi, kiai perdikan yang merupakan penduduk kaya di desa Banjarsari dapat dianggap sebagai katup

³³ *Het Stelsel van Cultuur*, 10 Mei, 1858, hlm. 2.

pengaman bagi penduduk miskin. Dalam teori moral ekonomi petani Scott, penduduk kaya di pedesaan yang umumnya para pemilik tanah berfungsi sebagai asuransi kesejahteraan bagi keluarga miskin.

Selain itu, Kiai Ageng Muhamamd bin Umar sebagai kiai sekaligus kepala desa perdikan Banjarsari dan keturunannya yang membentuk kelompok priyayi desa otomatis mendapatkan *privilege* yang membedakannya dengan *wong cilik*. *Privilege* yang didapat kiai perdikan Banjarsari dan keturunannya tersebut mengharuskan *wong cilik* memberikan hormat dan tunduk patuh kepada mereka. *Privilege* tersebut senyatanya subur di Jawa yang feodal dan langgeng hingga alam republik.

KESIMPULAN

Banjarsari sebagai desa perdikan dan pesantren—lembaga pendidikan keagamaan yang paling berpengaruh di Jawa abad 18-19, menjadikannya mandiri dan lepas dari pengaruh serta campur tangan pihak manapun tidak terkecuali pemerintah kolonial. Selain status desa perdikan yang menjadikannya merdeka, kemandirian tersebut tidak lepas dari sistem sosial dan ekonomi tradisional yang berlaku di Desa Banjarsari yang terpisah dari kerangka sistem eksploitasi ekonomi kolonial. Sistem ekonomi tradisional pedesaan yang menitikberatkan pada sektor pertanian—yang termanifestasi dalam relasi personal patron-klien—dan didukung oleh sektor kedua yakni perdagangan sapu ijuk sebagai produk lokal ikut mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga menjadikan Banjarsari sebagai desa perdikan yang benar-benar mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Lucien. “Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen. VI: Het Tijdvak van de ‘Palihan’ tot 1825”, Djawa, No. 20, September, hlm 329-46. 1940.

Bapak Sugeng. Desa Banjarsari Kulon, 4 Juli 2020.

Bapak Wijayanto. Desa Banjarsari Kulon, 13 Mei 2020.

Besari, M. Barokah Hasan. *Silsilah Kiai Ageng Kasan Besari Tegalsari Jetis Ponorogo*. Ponorogo :.. 1974.

- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
- Brumund, J. F. G. *Het Volksonderwijs onder de Javanen*. Batavia: Van Haren, Noman dan Kolff, 1857.
- Carey, Peter dan M. C. Hoadley (peny.). *The Archive of Yogyakarta. Vol. II: Documents relating to Economic and Agrarian Affairs*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Carey, Peter. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama Jawa, 1785-1855*. Jakarta: KPG, 2012.
- Fokkens, F. 1886. “Vrije desa’s op Java en Madura”, *TBG* 31:477–517.
<http://www.tirto.id/taktik-belanda-mengendalikan-islam-melalui-gelar-haji-cvHx>.
 diakses pada 8 Maret 2020.
- Ibu Sri Aningsih. Desa Banjarsari Wetan, 7 Maret 2020.
- Kamil, M.M. *Kyai Mangunharso Pembangun Desa Balerejo*. Ikatan Keluarga Besar Mangunarsan Cabang Bandung: t.p., 1990.
- Onghokham. *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*. Jakarta: KPG, 2018.
- Purnomo, R. Hadi. *Silsilah Kiai Mohamad bin Umar*. Madiun: t.p., 1989.
- Ricklefs, Merle C. *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792: A History of the Division of Java*. London: Oxford University Press, 1974.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tanggal 22 September 1853, No. 2.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Syamsoehari, M. Noor. *Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari, Dagangan Madiun dan Ky. Ageng H. Abdurohman Tegalrejo, Takeran Magetan*. Magetan: t.p., 1984.
- Van Niel, Robert. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2003.